



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	26 AGUSTUS	DESEMBER	

Tarif Honor DPRD Banten Fantastis

NYARIS 10 KALI LIPAT DPR RI

SERANG, BANPOS - Anggaran swakelola DPRD Banten disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di antara DPRD provinsi se-Indonesia. Sekretaris DPRD Banten, EA Deni Hermawan menyebut anggaran itu digunakan untuk biaya perjalanan dinas anggota DPRD Banten. Setelah ditelusuri, honor dan biaya perjalanan DPRD Banten nilainya sangat fantastis.

Dalam data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

“Salah satu DPRD Banten yang hariannya mencapai Rp2.000.000 per hari, dan uang representasi mencapai Rp2.000.000 per hari untuk wakil ketua DPRD RI yang nilainya mencapai Rp1.800.000, sedangkan uang representasinya sama dengan Ketua, yaitu Rp1.750.000. Sementara untuk anggota, uang harian dan uang representasi masing-masing sebesar Rp1.500.000.”

Tarif Honor...

Sambungan dari Halaman 1

atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun anggaran 2018, disebutkan realisasi pembayaran uang harian dan uang representasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Banten di tahun anggaran 2018 tidak sesuai azas kepatutan. Dalam LHP disebutkan Sekretariat DPRD Banten menganggarkan belanja barang jasa untuk perjalanan dinas sebesar Rp197.339.353.400, dengan realisasi sebesar Rp177.072.224.677.

LHP menyebutkan, dalam melakukan perjalanan dinas, pimpinan dan anggota DPRD Banten mendapatkan biaya penggantian berupa biaya perjalanan dinas. Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah terdiri dari uang harian, uang representasi, biaya transportasi dan biaya penginapan.

Dalam LHP itu BPK RI membandingkan tarif uang harian pimpinan dan anggota DPRD Banten yang besarnya mencapai 5 hingga 14 kali lipat dari tarif uang harian anggota DPR RI. Adapun besaran uang harian Pimpinan dan anggota DPRD Banten mengacu pada Pergub Banten nomor 80 tahun 2017, sedangkan pimpinan dan anggota DPRD RI mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 37/PMK.02/2018.

Dalam berkas hasil audit tersebut dipaparkan, untuk setiap perjalanan dinas dalam kota, Ketua, Wakil Ketua maupun anggota DPR RI mendapatkan uang harian dan uang representasi yang nilainya sama. Untuk uang harian senilai Rp210.000 per hari, dan uang representasinya hanya Rp125.000 per hari.

Sedangkan di DPRD Banten, ada

perbedaan tarif antara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Untuk Ketua DPRD Banten, uang hariannya mencapai Rp2.000.000 per hari, dan uang representasi senilai Rp1.750.000 per hari.

Untuk wakil ketua DPRD Banten, uang hariannya dalah Rp1.800.000, sedangkan uang representasinya sama dengan Ketua, yaitu Rp1.750.000. Sementara untuk anggota, uang harian dan uang representasi masing-masing sebesar Rp1.500.000.

Untuk perjalanan dinas luar kota, Ketua hingga anggota DPR RI juga masih mendapatkan hak yang nilainya sama. Untuk uang harian sebesar Rp580.000, untuk uang representasi nilainya Rp250.000.

Sedangkan untuk Ketua DPRD Banten uang harian dalam perjalanan dinas luar kota nilainya mencapai Rp4.000.000, dengan uang representasi Rp2.500.000. Untuk wakil ketua, uang hariannya Rp3.200.000, uang representasi Rp2.300.000. Sementara untuk anggota uang harian senilai Rp3.000.000, dan uang representasi sebesar Rp1.700.000. Semua tarif itu dibayar per hari.

“Hasil wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat DPRD Banten diketahui bahwa rincian tarif komponen biaya perjalanan dinas dalam Pergub 80 tahun 2017 berasal dari usulan pimpinan dan anggota DPRD Banten yang diajukan ke gubernur melalui Nota Dinas Ketua DPRD Nomo 162.4/794/DPRD tanggal 16 Oktober 2017, perihal Usulan biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Banten. Usulan itu dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan pada tahun sebelumnya terkait biaya perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD yang berlaku di

Provinsi Lain, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Selatan,” demikian kutipan dari LHP BPK RI.

Dalam LHP itu juga disebutkan, kondisi itu tidak sesuai dengan Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018, pada lampiran III antara lain menyatakan struktur satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan kepala daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajiban serta rasionalitas.

Selain itu, kondisi itu juga dianggap bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011, terutama pada pasal 4.

“Kondisi tersebut mengakibatkan pembayaran uang representasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Banten tahun 2018 tidak memenuhi azas kepatutan,” bunyi LHP BPK RI tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Persatuan Mahasiswa Tunjung Teja (Permata), A Rohani menyalahkan ketidakpekaan DPRD Banten sebagai institusi negara yang kehilangan rasa keprihatinan atas kondisi Banten yang masih banyak dihuni oleh warga miskin. Menurutnya, perbedaan tarif biaya perjalanan antara DPR RI dan DPRD Banten menunjukkan lembaga itu tidak mengindahkan azas kepatutan.

Bahkan, bila dibanding dengan kinerjanya, Rohani menduga para pimpinan dan anggota DPRD Banten hanya berniat mengeruk uang negara untuk kepentingan pribadi. Karena, dengan banyaknya ra-perda yang tidak tuntas, dan ting-

kat kehadiran anggota DPRD Banten yang sangat minim, maka sudah jelas tarif tersebut sudah sangat menyakiti rakyat Banten.

“Dalam kondisi mereka berprestasi pun, tarifnya sudah sangat jauh dari kepatutan. Apalagi ini, kinerja mereka sangat disorot karena banyak kelemahannya, tetapi ternyata penghasilan mereka sangat besar,” kata Rohani.

Rohani juga menduga, besarnya tarif itu yang membuat para legislator di Banten lebih suka melakukan perjalanan dinas ketimbang mengurus kewajibannya di gedung dewan.

“Jelas ini pengkhianatan kepada masyarakat Banten. Karena uang yang nilainya fantastis itu berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat,” kata Rohani.

Terpisah, Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten, Budi Prajogo mengaku kurang memahami perbedaan tarif yang terjadi antara DPR RI dengan DPRD Banten. “Saya belum pernah di DPRD RI mas, jadi nggak paham. Komponen (Biaya perjalanan dinas, red) mereka kalau ke luar negeri setahu saya dolar,” kata Budi melalui aplikasi pesan Whatsapp, akhir pekan lalu.

Budi juga memngatakan penyusunan anggaran pada 2018 lalu sudah dikonsultasikan ke Kemendagri. Pihaknya juga mengaku mengikuti pedoman penyusunan anggaran yang diterbitkan setiap tahun.

“Tetapi kita menghormati hasil audit dan kita patuhhi rekomendasi BPK,” tuntas Budi.

Sementara, hingga berita ini diturunkan, Sekretaris DPRD Banten EA Deni Hermawan tak bisa dikonfirmasi. Pesan Whatsapp yang dikirimkan BANPOS tak respon oleh Deni. (RUS/ENK)

Baca TARIF Hal-5